

SKRIPSI

**SINKRONISASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG EFISIENSI ANGGARAN DENGAN UNDANG-UNDANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM
PERSPEKTIF *REGLING* DAN *BELEIDSREGEL***

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

A. FARHAN AL HUSAINI

2210113146

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

**Delfina Gusman, S. H., M. H.
Beni Kharisma Arrasuli, S. H. I., LL. M.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

No.Reg: 08/PK-V/I/2026



No. Alumni Universitas	A. Farhan Al Husaini		No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir	: Gedung Pakuon/ 01 Desember 2003	f. Tanggal Lulus	: 28 Januari 2026
b. Nama Orangtua	: Yose Rizal dan Hartati Ningsih	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian
c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 3 Tahun 6 Bulan
d. PK	: Hukum Tata Negara	i. IPK	: 3,85
e. No. BP	: 2210113146	j. Alamat	: Simpang Ketibung RT. 001/RW. 005, Gedung Pakuon, Baradatu

SINKRONISASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN DENGAN UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM PERSPEKTIF *REGLING* DAN *BELEIDSREGEL*

(A. Farhan Al Husaini, 2210113146, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 114 Halaman, 2026)

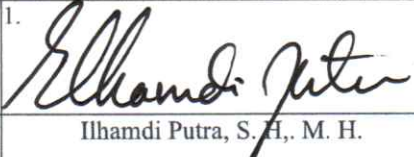
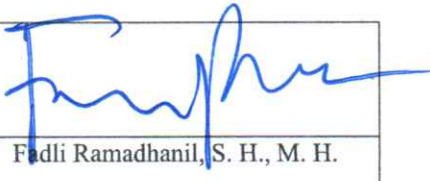
ABSTRAK

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran diterbitkan sebagai kebijakan pengendalian belanja kementerian/lembaga. Namun, kebijakan ini menimbulkan persoalan hukum tata negara karena berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan melalui undang-undang atas persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini mengerucut pada dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana sinkronisasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang APBN dalam perspektif *regeling* dan *beleidsregel* dan Kedua, bagaimana Keabsahan Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Konteks Kewenangan Presiden sebagai Lembaga Eksekutif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak sinkron dengan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 karena secara substansial mengandung norma yang bersifat *regeling*, meskipun secara formal diterbitkan sebagai *beleidsregel*, sehingga berdampak pada perubahan pelaksanaan anggaran yang telah disetujui DPR. Selain itu, Inpres ini tidak didasarkan pada keadaan mendesak yang membenarkan penggunaan diskresi (*freies Ermessen*). Adapun saran penelitian ini adalah agar setiap perubahan terhadap APBN dilakukan melalui mekanisme APBN-P atau Perpu serta diperlukan penegasan batas kewenangan peraturan kebijakan dalam sistem hukum nasional guna mencegah penyalahgunaan kewenangan eksekutif.

Kata Kunci: Instruksi Presiden, APBN, *Regeling*, *Beleidsregel*, Keabsahan Konstitusional.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 28 Januari 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Ilhamdi Putra, S. H., M. H.	Fadli Ramadhanil, S. H., M. H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: Arfiani, S. H., M. H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



Alumni University Number	A. Farhan Al Husaini	Alumni University Number
f. Place/Date of Birth : Gedung Pakuon/ 01 Desember 2003	f. Graduation Date : Januari 28 th 2026	
g. Parents' Name : Yose Rizal and Hartati Ningsih	g. Pass Predicate : Cumlaude	
a. Faculty : Law	h. Length of Study : 3 years 6 months	
b. Concentration : Constitutional Law	i. GPA : 3,85	
c. Student ID : 2210113146	Address : Simpang Ketibung RT. 001/RW. 005, Gedung Pakuon, Baradatu	

***SYNCHRONIZATION OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING BUDGET EFFICIENCY WITH THE STATE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET LAW FROM THE PERSPECTIVE OF REGELING AND
BELEIDSREGEL***

(A. Farhan Al Husaini , 2210113146, Faculty of Law, Andalas University, 114 Pages, 2026)

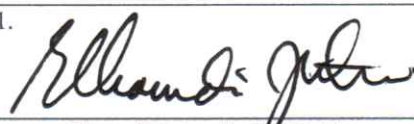
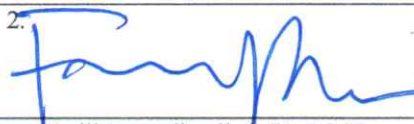
ABSTRACT

Presidential Instruction Number 1 of 2025 on Budget Efficiency was issued as a policy to control and rationalize ministerial and institutional expenditures. However, this policy raises constitutional law issues because it relates to the implementation of the State Budget (APBN), which is enacted by law based on the joint approval of the President and the House of Representatives (DPR). This research focuses on two legal issues: first, the synchronization of Presidential Instruction Number 1 of 2025 with the State Budget Law from the perspective of regeling and beleidsregel and second, the validity of the issuance of Presidential Instruction Number 1 of 2025 on Budget Efficiency within the context of the President's authority as the executive branch. This research employs a normative juridical legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Presidential Instruction Number 1 of 2025 is not synchronized with the State Budget Law for Fiscal Year 2025 because, in substance, it contains norms of a regeling nature, despite being formally issued as a beleidsregel, thereby affecting the implementation of budget allocations that have been approved by the DPR. Furthermore, the Presidential Instruction was not issued under urgent circumstances that would justify the use of discretion (freies Ermessen). This research recommends that any changes to the State Budget should be carried out through the mechanism of a Revised State Budget Bill (APBN-P) or a Government Regulation in Lieu of Law (Perpu), and that clearer limitations on the authority of policy regulations are necessary within the national legal system to prevent future abuse of executive power.

Keywords: Presidential Instruction, State Budget, Regeling, Beleidsregel, Constitutional Validity.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at Januari 28th, 2026.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Ilhamdi Putra, S. H., M. H.	Fadli Ramadhanil, S. H., M. H.

Acquainted,

Head of the Department of Constitutional Law: Arfiani, S. H., M. H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: